



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

GERBANG

GERAKAN BANGSA



OPINI

- **18** POLITIK UANG PILKADA PADA MASA PANDEMI
- **26** DEMOKRASI & KEBABLASAN

KABAR UTAMA

SKPP 10
SEKOLAH KADER
PENGAWAS PARTISIPATIF

Tingkatkan Partisipasi Masyarakat, Bawaslu gelar SKPP

DIKSI 06
DISKUSI DEMOKRASI

Program Live Streaming Bawaslu Karanganyar

EKSISTENSI 14
BAWASLU KARANGANYAR
SEPANJANG 2020

Kegiatan Bawaslu Karanganyar Sepanjang Tahun 2020

PPID 09

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

SKPP PERJALANAN BARU BAWASLU



DAFTAR ISI

- 03 Salam Redaksi
- 04 Profil Bawaslu Karanganyar
- 06 DIKSI : Diskusi Demokrasi
- 08 Kang Kepo
- 09 PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi)
- 10 Tingkatkan Partisipasi Masyarakat,
Bawaslu Gelar Sekolah Pengawas Partisipatif (SKPP)
- 11 Bawaslu Mengudara,
Keterbukaan Informasi & Edukasi Demokrasi
- 12 Antisipasi Covid-19 :
Bawaslu Karanganyar Lakukan Serangkaian
Kegiatan Pencegahan & Edukasi Kepada
Masyarakat
- 14 Eksistensi Bawaslu Karanganyar Sepanjang 2020
- 16 Tutup Tahun 2020;
Bawaslu Karanganyar Bersama Rakyat
- 17 Ramaikan HUT Bawaslu ke-12,
Bawaslu Karanganyar Gelar Bakti Sosial &
Penyemprotan Disinfektan
- 18 Politik Uang Pilkada Pada Masa Pandemi
- 20 Film Pendek
- 20 SKPP Bukan Sedekar Singkatan
- 22 Sinergi Lembaga Bawaslu
- 24 Perempuan, Politik & Demokrasi
- 26 Demokrasi & Keablasan
- 26 Bawaslu Siap Sedia Mengawasi
- 28 Galeri 2020
- 30 Sajak Demokrasi Part III
- 31 Teka-teki Cekak



Dewan Pengarah :

Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H.,M.H.
Sudarsono, S.Fil.I
Sri Handoko Budi Nugroho, S.T.,M.M.
Edi Budi Susilo, S.T.
Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd.

Penanggung Jawab

Riyadi, S.E.

Pimpinan Redaksi

Argo Teguh Herjantoro, S.P.

Redaktur

Aditya Angga Rohendriyanto, S.H.

Editor

Rofi' Rasyidah, S.H.

Desain Grafis & Layout

Joko Susilo, S.Kom.
Vondra Surya Dananjaya, S.H.

Kontributor

Dwi Astuti, S.E.
Dayinta Atindriya, S.E.
Danu Pradana, S.E.
Wisnu Sri Nugroho, S.H.



SALAM REDAKSI

Assalamualaikum..... KANG KEPO yang matanya jelalatan.... Ngenduuuuuus habiiiiis..... Selalu berjalan kesana-kemari lihat sana..... Lihat sini... Lihat itu..... Tidak pernah berhenti kepo in semua sepanjang penglihatan KANG KEPO..... Sedulur pasti tahu, dinamika yang terjadi dalam suatu lingkungan sering bikin kita penasaran dan bikin kepo dengan apa yang terjadi didalamnya. Sejauh mana, sih kontribusi yang diberikan oleh pribadi-pribadi? Apa mampu menunjang stabilitas dan peningkatan nilai akreditasi lembaga?. Seharusnya mereka dituntut untuk berperan aktif dalam membangun kualitas lembaga sehingga dapat menjadi lebih baik. Akhirnya masyarakat bisa menikmati hasilnya. Ya nggak, Luuur...??

Biasanya pelaku lembaga mendapatkan pembekalan melalui proses yang sering disebut peningkatan SDM. Berarti mereka harus membuat suatu pilihan guna menentukan arah lembaga menjadi lebih baik. Perlu tersusunnya Perencanaan, dilanjut dengan Pelaksanaan. Setelah itu perlu adanya Evaluasi dari hasil kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana. Dengan begitu, harumnya eksistensi lembaga pasti akan tercium.... Terendus..... Terasa di tengah masyarakat kita. Terpenting juga jangan lupa,

perlu diperkuat hubungan antar masyarakat, lembaga, organisasi, dan Pemerintah Daerah setempat. Agar selalu bekerjasama dan bersinergis untuk mewujudkan tujuan kedepan. Pembaca pasti setuju dengan pandangan KANG KEPO. Lha KANG KEPO diam-diam begini bisa menghanyutkan hati pembaca, lho..... Wkwkwkwk.

Buletin Edisi kali ini, KANG KEPO akan menyampaikan informasi maupun berita yang terjadi di dalam lingkungan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Ayo kita kepo in apa itu DIKSI yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Terus ada kayak istilah SKPP, setahu KANG KEPO itu, kan SATE KAMBING PAK PUR..... Wkwkwkwkwk. Apa mereka nyambi jualan sate?? Apa sih istilah SKPP itu yang sebenarnya. Terus mentang-mentang paradigma Bawaslu adalah pencegahan.. Lha kok COVID-19 gencar dicegah juga, apa hubungannya ?? Ternyata Bawaslu Karanganyar juga sering bersilaturahmi ke jajaran

. Kayak lebaran ajah pake silaturahmi segala.... Bawa parcel, nggak tuh?, wkwkwk. Padahal Bawaslu setara anakku, lho, umurnya baru 12 Tahun.... Masih SD sudah berani bikin gebrakan dimana-mana. Kita lihat saja kupasan cerita seputar HUT Bawaslu ke 12 Tahun. Apa saja yang mereka lakukan untuk merayakan ultahnya. Anehnya lagi, ada semacam nama partai politik di dalam rumah Bawaslu. Istilah PPID berasa asing di telinga kita.... Jangan-jangan Bawaslu tidak netral.

Ayo, Lurrrr... Kita kepo in aja semuanya. Maunya mereka apa, sih ? Eksistensinya seperti apa ? Perahu Bawaslu mau diarahkan kemana ? Terus akreditasi lembaga bisa terwujud, nggak ?? Pokoknya kita kepo in lembar per lembar tulisan di buletin kali ini ya, Lurr... Biar KANG KEPO dan semua sedulur komunitas bisa paham semua yang sudah dilaksanakan Bawaslu. Oke, Tariiiiik, Sis.....

KANG KEPO minta maaf, lho ya. Jika hasil pengkepoan cerita dalam buletin ini terdapat kesalahan. Namanya manusia tidak ada yang sempurna. Cailah... Setelah kalian membaca isi buletin ini. Mari kita kumpul lagi dan kita kupas. Kita gamblangkan semua yang sudah kita kepo in kepada semua pemirsa. Harapannya, kita bisa kasih masukan, kritik, dan saran ke Bawaslu. Supaya Bawaslu makin eksis di tengah masyarakat. Selanjutnya KANG KEPO mengucapkan selamat membaca dan tetap semangat. Sampai berjumpa lagi..... Muaaachh Cemuanya.





Nuning Ritwanita P., M.H.
Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar
Kordiv Penindakan Pelanggaran



Sri Handoko Budi N., M.M.
Kordiv Pengawasan dan
Hubungan Antar Lembaga



Sudarsono, S.Fil.I.
Kordiv Organisasi dan SDM

Nuning Ritwanita P., M.H.
Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar
Kordiv Penindakan Pelanggaran

Sri Handoko Budi N., M.M.
Kordiv Pengawasan dan
Hubungan Antar Lembaga

Sudarsono, S.Fil.I.
Kordiv Organisasi dan SDM

STRUKTUR ORGANISASI

PANWASCAM

PPD/K

PTPS

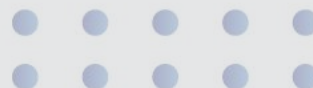
Wisnu Sri Nugroho, S.H.
Staf Penyelesaian Sengketa

Aditya Angga Rohendriyanto, S.H.
Staf Penanganan Pelanggaran

Rofi' Rasyidah, S.H.
Staf Hukum, Humas, Datin

Danu Pr...
Staf K...

Dwi A...
Staf K...





Edi Budi Susilo, S.T.
Kordiv Penyelesaian Sengketa



Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd.
Kordiv Hukum, Humas, Data dan Informasi



Riyadi, S.E.
Koordinator Sekretariat
Bawaslu Karanganyar

ENO

o, S.Fil.I.
isiasi dan SDM

Edi Budi Susilo, S.T.
Kordiv Penyelesaian Sengketa

Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd.
Kordiv Hukum, Humas, Data dan Informasi

Riyadi, S.E.
Koordinator Sekretariat
Bawaslu Karanganyar

Binar Syahbani W., S.E., M.E.
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Bawaslu Karanganyar

adana, S.E.
 Keuangan

Argo Teguh Herjantoro, S.P.
 Staf Pengawasan dan Hubal

Joko Susilo, S.Kom.
 Staf Organisasi dan SDM

stuti, S.E.
 Keuangan

Vondra Surya Daanjaya, S.H.
 Staf Pengawasan dan Hubal

Anto Setiyawan, S.ST.
 Staf Organisasi dan SDM

Dayinta Atindriya, S.E.
 Staf Organisasi dan SDM

Joko Hari Purwanto
 Tenaga Pendukung

Ngatmini
 Tenaga Pendukung

Rahmad Purnomo
 Tenaga Pendukung

PROFIL BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR



'DIKSI' diskusi demokrasi

Masa pandemi Covid-19 (corona virus disease 2019) yang melanda dunia di akhir tahun 2019 hingga tahun 2020 ini, mengubah segala kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Segala aktivitas manusia sempat terhenti sejenak untuk mengatur strategi baru agar penularan Covid-19 dapat dikendalikan. Tentu hal ini tidak pernah direncanakan manusia sebelumnya. Terlepas apakah virus ini buatan manusia atau sebuah kecelakaan penelitian atau yang lainnya, namun kenyataannya wabah virus corona ini berdampak pada seluruh aktifitas manusia di penjuru dunia.

komunitas-komunitas, unsur pemuda, sesama penyelenggara pemilu, sekolah, instansi pemerintah daerah yang berkaitan dengan kepemiluan dan lain sebagainya. Dibingkai dalam sebuah forum diskusi membahas demokrasi, kepemiluan dan pengawasan pemilu sehingga siapapun dapat mengakses dan melihat isi diskusi kapan pun dan dimanapun.

DIKSI (Diskusi Demokrasi) merupakan forum diskusi Bawaslu Karanganyar yang mendiskusikan perkembangan demokrasi kekinian. Melihat demokrasi dari berbagai perspektif. Mengingat demokrasi sendiri dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang demokrasi dilihat dari penyelenggaraan pemilu, maupun diluar penyelenggaraan pemilu.

Sehingga, upaya Bawaslu dalam membumikan pengawas pemilu dapat masuk ke segala lini. Inovasi model pencegahan dan pengawasan harus dikembangkan Bawaslu secara "bernas". harapannya adalah nilai-nilai pengawasan pemilu semakin membumi di masyarakat kita (M. Afifuddin: 2020). (Ikh)

Diskusi Demokrasi (Diksi) merupakan sarana Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam mensosialisasikan pengawasan, kepemiluan, dan demokrasi dengan menggandeng pihak luar sebagai narasumber. Acara

ini dilaksanakan setiap awal bulan dan tayang memanfaatkan channel youtube Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Koordinator Divisi (Kordiv)



K e t e r b a t a s a n menyampaikan sosialisasi kepengawasan pemilu kepada masyarakat dengan metode tatap muka, Bawaslu Karanganyar melihat peluang dengan metode sosialisasi dengan media Live streaming melalui YouTube. Sebagai narasumber melibatkan



Hukum dan Humas, Ikhlan Nur Isfianto mengatakan, Diksi bagian dari aktualisasi ide dan gagasan Bawaslu Karanganyar kedepan. Bergulirnya program Diksi, tambahnya, diharapkan mampu memberikan warna dalam demokrasi khususnya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang akan datang.

"Terlebih saat ini era media sosial. Dengan adanya Diksi,



sosialisasi Bawaslu dengan masyarakat cakupannya lebih luas dan tidak terbatas wilayah,” tambahnya.

Diksi yang tayang



perdana pada Selasa (07/07/2020) hingga saat ini sudah memasuki edisi Ke-enam dengan beragam tema yang disuguhkan kepada masyarakat. Tema pertama menyoal ‘Media Sosial, Demokrasi, dan Pandemi’ menghadirkan dua narasumber, dari pihak Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Ketua Bawaslu, Nuning Ritwanita Prihastuti dan admin Info Warga Karanganyar (IWK), Irfan Samudra. Dipandu host dari jajaran staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Edisi kedua membahas soal sinergi kelembagaan ‘Bawaslu

dan KPU Karanganyar dalam Merawat Demokrasi yang dilaksanakan, Selasa (04/08/2020). Pemberi materi Kordiv Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Sri Handoko Budi Nugroho dan Anggota KPU Karanganyar, Muhammad Maksum. Sementara pada edisi ketiga, Diksi mengambil tema ‘Peran Generasi Muda Dalam Mengawal Demokrasi’ yang disesuaikan dengan momentum Hari kemerdekaan Republik Indonesia Ke-75, pada hari Rabu (19/08/2020).

Bertindak sebagai narasumber Kordiv Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO), Sudarsono, Ketua KNPI Kabupaten Karanganyar, Aan Shopuanudin, Ketua Pemuda Ansor Karanganyar, Iwan Suswanto, dan Ketua Pemuda Muhammadiyah Karanganyar, Heri Suyadi.

Sedangkan pada edisi keempat, tema yang diambil adalah Pelajar, Demokrasi dan Pengawas Partisipatif; Peran Pelajar Mengawal Demokrasi Yang Beradab. Pelaksanaannya digelar, Kamis (03/09/2020) dengan narasumber Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum dan Humas, Ikhsan Nur Isfiyanto, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Karanganyar, Suliyastuti, dan Ketua OSIS SMA Negeri 2 Karanganyar, Muhammad Ananda Rifky. Edisi kelima focus pada isu ‘Menjaga Kondusifitas Pemasangan APK Pilkada di Solo Raya’.

Para narasumber antara



lain Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Edi Budi Susilo, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Timotius, dan Kepala Satpol PP Kabupaten Karanganyar, Yopi. Live streaming tersebut dilaksanakan Kamis, (08/10/2020) hingga selesai.

Sementara edisi keenam, Diksi memfokuskan pada refleksi hari Pahlawan dan kaitannya dengan proses demokrasi yang sudah berjalan hampir setengah abad. Bawaslu kali ini mengundang Ketua Dewan Harian Cabang (DHC) 45 Karanganyar, Tjuk Susilo, Ketua Forum Mahasiswa Karanganyar (FORMAKA), Endang Palupi dan Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Nuning Ritwanita Prihastuti. Pelaksanaannya akan digelar Selasa (10/11/2020). (Dars)





#BawasluKaranganyar #KangKepo #OrganisasidanSDM
 KANG KEPO | BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR | ORGANISASI DAN SDM

164 x ditonton • 20 Nov 2020

19 0 BAGIKAN SIMPAN ...

 **Bawaslu Karanganyar**
 219 subscribers

DISUBSCRIBE 

#BawasluKaranganyar #KangKepo #OrganisasidanSDM

**“ Mata jelalatan,
 Mengendus habis,
 Kepo sana-sini.”**

KANG KEPO

Tuntutan sebuah masa. Apakah itu masa digitalisasi, masa modern, masa kekinian, masa pandemi atau masa apapun. Manusia, kelompok manusia, perusahaan, komunitas bahkan lembaga pemerintahan harus memiliki cara untuk menjawab tantangan masa tersebut. Menjawab tantangan dengan berbagai terobosan untuk mencapai visi dan misinya.

Dalam hal menjawab tantangan masa, terutama masa pandemi Covid-19 ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar mencoba berinisiatif untuk membuat berbagai kretifitas guna menyampaikan visi misinya kepada masyarakat.

Mengenai informasi kelembagaan, Bawaslu Karanganyar program Podcast. Menggunakan tokoh karakter “Kang Kepo”,

program ini mengupas tentang isi lembaga. Mulai dari sistem informasi Bawaslu Karanganyar, Program strategis Bawaslu, kewenangan lembaga Bawaslu dan lain sebagainya. Program Podcast Kang Kepo disajikan dengan santai, isi materi padat sehingga masyarakat dapat melihat apa saja yang ada di dalam Bawaslu Karanganyar. (AA)



PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pada era saat ini yang serba digital, Bawaslu dituntut untuk bisa memberikan keterbukaan informasi kepada publik maka dengan adanya tuntutan tersebut, lahirlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor : 0075/K. Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota, Bawaslu Kabupaten Karanganyar langsung merespon dengan membuat PPID untuk mempermudah kerja dan penyampaian informasi kepada masyarakat umum. Website PPID Kabupaten Karanganyar terdiri dari Informasi Setiap Saat, Informasi Serta Merta, Informasi Berkala dan Informasi yang Dikecualikan.

Kedepan dengan adanya PPID, Bawaslu Kabupaten Karanganyar berharap untuk masyarakat bisa dipermudah dengan layanan tersebut, karena mereka bisa dengan mudah mendapatkan informasi terkait produk hukum yang dihasilkan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Apabila masyarakat ingin memperoleh informasi langsung juga bisa langsung datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk mengajukan permohonan informasi yang diinginkan kepada para petugas PPID. (Dars)





TINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT, BAWASLU GELAR SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP)

Bawaslu RI menggelar Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dan dimulai sejak tanggal 5 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei 2020. Berhubung karena virus Corona semakin meluas penyebarannya di Indonesia, pelaksanaan pembelajaran sekolah ini dilakukan secara audio visual menggunakan channel Youtube. SKPP bertujuan sebagai media komunikasi dan kerjasama antara Bawaslu dengan masyarakat secara luas untuk bersama-sama menciptakan proses Pemilu/Pilkada yang berintegritas dengan memaksimalkan pengawasan setiap tahapan berlangsung.

Adapun peserta yang berhasil dijaring Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebanyak 59 orang. 51 orang

dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan delapan orang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sehingga total peserta yang lolos berdasarkan penelitian administratif berjumlah 51 orang dengan komposisi 28 peserta terdiri dari laki-laki dan 23 peserta dari unsur perempuan. Setelah melalui serangkaian tahapan seleksi administrasi, pembelajaran via daring, webdiskusi (diskusi online) dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan ujian akhir secara online. Bawaslu Republik Indonesia mengumumkan nama-nama peserta yang dinyatakan lulus, Kamis (02/07/2020) dan untuk Karanganyar sendiri berjumlah 40 orang/peserta.

Proses pembelajaran ini terdiri dari sembilan topik dan setiap topik terdapat lima video, meliputi pengawasan

tahapan Pemilu dan Pilkada, regulasi Pemilu dan Pilkada, kerawanan Pemilu dan Pilkada, mekanisme Pemilu dan Pilkada, mekanisme penanganan pelanggaran, mekanisme penyelesaian sengketa, pengawasan partisipatif, strategi kehumasan kader pengawas, dan pemantauan Pemilu dan Pilkada.

Bawaslu Karanganyar kemudian menyerahkan sertifikat untuk alumni kader pengawasan secara simbolis kepada tiga orang perwakilan di Aula Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Sisanya sebanyak 37 sertifikat dikirim melalui jasa pengiriman ke alamat masing-masing alumni.

Baru-baru ini Bawaslu Kabupaten Karanganyar kembali menjaring alumni kader pengawasan untuk ditetapkan sebagai 'Duta Pengawasan' berjumlah dua orang dan untuk mengikuti pelatihan 'Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Pemilu Partisipatif' yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selama tiga hari (26 – 28 Oktober 2020) bertempat di Salatiga, Jateng.(Dars)

Tahapan Pelaksanaan

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring Tahun 2020

1 PENDAFTARAN

55% 45%
TOTAL PENDAFTAR
59 ORANG
TOTAL PESERTA LOLOS SELEKSI
51 ORANG

2 PEMBELAJARAN DARING



Materi disampaikan melalui pembelajaran secara online

4 UJIAN AKHIR



Ujian Akhir guna menentukan kelulusan

3 DISKUSI DARING



Materi disampaikan melalui pembelajaran secara online



TOTAL PESERTA LULUS:
40 ORANG

Peserta yang lulus memperoleh sertifikat SKPP Daring Tahun 2020



BAWASLU MENGUDARA, KETERBUKAAN INFORMASI DAN EDUKASI DEMOKRASI

Ditengah adanya pandemi covid-19 ini Bawaslu kabupaten Karanganyar tidak patah semangat untuk terus melakukan sosialisai Meskipun tidak bisa melakukan sosialisasi lagsung atau tatap muka , teratasi dengan sosialisasi melalui media daring untuk menunjukan eksistensi. Mereka mengandeng Radio Swiba Karanganyar, untuk melakukan siaran Radio yang telah dilakukan pada 14 Oktober 2020 jam 20.30 WIB dengan tema Bawaslu Mengudara kesempatan tersebut dari bawaslu diwakili oleh Riyadi Korsek Bawaslu Kabupaten karanganyar dan Ikhsan Nur Isfiyanto Kordiv Hukum, Humas dan Datin dipandu oleh Dede penyiar

Radio Swiba Karanganyar. Siaran pertama tersebut mengambil tema mengenai Keterbukaan Informasi Bawaslu Karanganyar kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Bawaslu untuk mensosialisasikan mengenai PPID yang telah dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar dimana masyarakat telah dimudahkan dengan adanya PPID tersebut karena mereka sudah bisa mengakses informasi Terkait Kelembagaan, Produk Hukum dan mengenai hal-hal terkait Kepemiluan yang telah disampaikan oleh bawaslu dalam website PPID tersebut. Pada akhir siaran ditutup dengan penandatanganan MOu kerjasama antara Bawaslu Kabupaten

Karanganyar dengan Radio Swiba.

Masyarakat juga bisa mengakses informasi yang diinginkan dengan datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan menemui petugas Pelayan PPID. Masyarakat diharuskan untuk mengajukan permohonan permintaan data terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan data yang diinginkan. Kedepan diharapkan adanya PPID yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Karanganyar bisa mempermudah masyarakat dalam mengakses data yang dibutuhkan terkait dengan Lembaga bawaslu khususnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar. (RR)



ANTISIPASI COVID-19 : BAWASLU KARANGANYAR LAKUKAN SERANGKAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN EDUKASI KEPADA MASYARAKAT

Perkembangan virus asal Negeri Tirai Bambu, Covid-19 akhir-akhir ini semakin merebak di Indonesia. Semua aktivitas masyarakat hampir 80% terganggu, termasuk aktivitas perkantoran seperti halnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menyikapi hal demikian dan sebagai langkah pencegahan penyebaran virus Corona, strategi baru harus dirumuskan salah satunya mengurangi pertemuan secara tatap muka. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melalui video conference dengan melibatkan 35 Kabupaten/Kota hendak memastikan jajarannya tetap bekerja dengan pola baru (work from home).

Acara tersebut dilaksanakan Kamis (19/03/2020) dan setiap peserta wajib mengikuti arahan tersebut di masing-masing kantor Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Adapun Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyimak acara video konferensi dari Aula Bawaslu yang terletak di Jl. Kertapati 1 Badranasri, Cangakan Barat, Karanganyar.

Sejumlah pimpinan Bawaslu Jateng turut memberikan arahan kepada peserta video conference. Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Fajar SAKA dalam kesempatannya memberikan himbauan terkait system kerja dari rumah (work from home). Sekalipun bekerja dari rumah, tambah Fajar, setiap jajaran

tetap melaksanakan kegiatan, namun tidak melibatkan massa yang banyak.

Selain Fajar, Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan, Anik Solikhatun, turut memberikan arahan terkait pentingnya menjaga kesehatan badan dan lingkungan. Ia juga menyinggung mengenai persiapan tahapan Pilkada 2020 bagi 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sementara Kordiv Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Heru Cahyono, menganjurkan masing-masing Kabupaten/Kota untuk mengikuti tahapan sidang sengketa di wilayah yang mengalami sengketa.

Kordiv SDM, Sri Sumanta juga menghimbau untuk tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan massa hingga



menunggu arahan selanjutnya baik dari RI maupun dari Provinsi. Masih dalam acara vidcon, Kordiv Humas, Rofiuddin menyinggung pentingnya media sosialisasi di tengah pandemi. Salah satunya, kata Rofi, produksi poster maupun live streaming sebagai alternatif





dilakukan Bawaslu Karanganyar (Papahan- Kabupaten Karanganyar, di antaranya menyediakan hand sanitazer di berbagai titik lokasi, memberikan edukasi baik kepada jajaran staf dan juga masyarakat umum pentingnya menjaga jarak, menggunakan masker dalam setiap beraktivitas dan utamanya setiap keluar rumah, dan menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing.

Tidak sampai disitu saja, komitmen dan keseriusan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam melawan Corona juga dibuktikan dengan pembagian masker kepada masyarakat umum sepanjang jalan protokol Kabupaten

Karanganyar (Papahan-Lampu merah Polres). Kegiatan bagi-bagi masker ini melibatkan unsur pimpinan dan jajaran staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat (02/10/2020) dan dimulai sekitar Pukul 09.00 WIB dengan dibuat dua kelompok agar lebih maksimal dalam penyebarannya. Kegiatan tersebut berakhir pada Pukul 10.21 WIB.

Kegiatan yang dimaksud tentu dalam rangka memberi edukasi kepada masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran diri terutama soal penerapan protokol kesehatan dan saling menjaga agar masyarakat terhindar dari penularan virus yang menyerang saluran pernafasan manusia. (Dars)

menyebarkan informasi sangat penting untuk terus dilakukan.

Di hari yang berbeda dan untuk memastikan lingkungan kerja bersih dari virus Corona, rangkaian kegiatan seperti penyemprotan disinfektan juga digelar di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada Selasa (24/03/2020) dengan melibatkan empat personil dan bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Karanganyar.

Adapun lokasi pembersihan dan penyemprotan disinfektan dilakukan di ruang Komisioner, ruang Sekretariat, ruang makan, dapur, tempat ibadah, hingga aula kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Penyemprotan dimulai pukul 10.20 WIB dan berlangsung kurang lebih dua puluh menit.

Sebelumnya, upaya pencegahan juga telah



KIPRAH BAWASLU KARANGANYAR SEPANJANG 2020

Sejumlah perencanaan terus dipersiapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar dalam rangka maksimalisasi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun kedepan, termasuk soal perencanaan keuangan. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Bimbingan Teknis (Bimtek) Kesekretariatan dan SDM terkait Penyelarasan Anggaran Tahun 2020 yang digelar Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bertempat di Hotel Santika Pekalongan (23-24/01/2020) lalu. Penyelarasan Rancangan Anggaran dan Belanja (RAB) untuk Tahun 2020 dilaksanakan di Aula Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Kamis (30/01/2020) dengan melibatkan Anggota dan jajaran kesekretariatan.

Point rapat kali ini terbagi dua secara garis besar; 'rutin' dan 'non rutin'. Kegiatan rutin meliputi rapat-rapat, sedangkan kegiatan non rutin mencakup langkah-



langkah atau strategi Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk persiapan Pemilu mendatang, seperti Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Sosialisasi Pengawasan Goes to School/ Campus, Pembinaan Desa Pengawasan dan Desa Anti Money Politic, Sosialisasi dengan Mitra Kerja, serta Pembinaan Pelaksanaan Penindakan dan Sengketa.

Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Nuning Ritwanita Priliastuti mengatakan bahwa

meskipun Karanganyar tidak melaksanakan Pilkada, namun Bawaslu Kabupaten Karanganyar tetap bertanggung jawab kepada masyarakat dengan melaksanakan sejumlah kegiatan yang bermanfaat untuk kedepannya. "Kita rampungkan perencanaan ini agar segera berkegiatan dengan melibatkan masyarakat.

Selain membahas anggaran Tahun 2020, pada kesempatan lain Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga terus menjalin komunikasi dan kerjasama dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Karanganyar guna memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu khususnya yang melibatkan pihak luar berjalan lancar. Roadshow audiensi dimulai pada Senin, (06/02/2020) dengan terlebih dahulu berkunjung kepada Bupati Kabupaten Karanganyar; Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar;



Kejaksaan Negeri Kabupaten Karanganyar; Kapolres Kabupaten Karanganyar; Dandim Kabupaten Karanganyar; Diskominfo Kabupaten Karanganyar; dan Disarpus Kabupaten Karanganyar.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar turut memberikan kenang-kenangan buku karya Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang berjudul “Gerbang Demokrasi Di Bumi Intanpari”.

Sementara, Bawaslu Republik Indonesia di bulan yang sama (02/2020) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai bagian dari pertanggungjawaban lembaga pengawasan dalam proses Pemilu yang sudah terlaksana. Kegiatan yang merupakan program Divisi Pengawasan Bawaslu RI tersebut dihadiri dan dibuka Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin dengan melibatkan Bawaslu Provinsi – Kabupaten/Kota se-Indonesia (Ketua Bawaslu Provinsi, Divisi Pengawasan Provinsi, Divisi Hubungan antar lembaga Provinsi, dan Divisi Pengawasan Kabupaten/ Kota).

Memanfaatkan momentum Pemilihan Kepada Desa di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah. Bawaslu Kabupaten Karanganyar turut menggelar acara sosialisasi pengawasan partisipatif bertajuk Demokrasi dalam Perspektif Kearifan Lokal. Kegiatan sosialisasi dilakukan di ruang meeting Jawa Dwipa Heritage Resort & Convention, Karanganyar, Selasa (03/03/2020). Peserta yang hadir berjumlah 100 orang

dengan perincian dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) di tujuh Kecamatan, Calon Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat.

Sebagai pemateri adalah Bupati Karanganyar, Juliyatmono, Kapolres Karanganyar yang diwakili Kabag Ops Polres Karanganyar, I Wayan Sudita, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Karanganyar mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar, Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, Ayun Kristianto, dan Komisiner Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Diskusi dipandu oleh Catur Lukito.

Juliyatmono dalam kesempatan ini mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Sekalipun Pilkadaes bukan ranah Bawaslu, kata Juli, Bawaslu mampu mengkoordinir seluruh pihak yang akan berkontribusi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. “Terima kasih untuk Bawaslu. “Ikut membantu Pemerintah Daerah dalam mensukseskan Pilkadaes pada gelombang III,”.

Sebelum kegiatan sosialisasi tersebut, Polres Kabupaten Karanganyar turut melibatkan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Daerah, dan Kejaksaan Karanganyar bersama-sama memberikan pemahaman kepada para Calon Kepala Desa dan tim pemenangannya di tujuh Desa dan bertempat di balai Desa setempat. Adapun ketujuh Desa ialah Desa Pendem dan

Desa Gebyok, Mojogedang, Desa Tuban, Gondangrejo, Desa Dawung, Matesih, Desa Berjo, Ngargoyoso, Desa Karangpandan, Karangpandan dan Desa Kaling, Tasikmadu.

Pemilih pemula di setiap perhelatan pesta demokrasi selalu menjadi topik menarik. Jumlahnya cukup fantastis untuk mendulang perolehan suara bagi peserta Pemilu/ Pemilihan. Menyikapi hal tersebut Bawaslu Kabupaten Karanganyar memilih langkah menggelar sosialisasi partisipatif “Nyemplung Pawiyatan” dengan melibatkan siswa/siswi SMK tepatnya SMK Negeri Jenawi bertempat di ruang kelas, Kamis (12/03/2020).



Kepala Sekolah SMK Jenawi, Sri Eka Lelan berharap dengan terselenggaranya kegiatan sosialisasi atas kerjasama Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan sekolah kejuruan ini anak didiknya menjadi lebih cerdas dan bias memahami demokrasi di Indonesia.

Penyampaian materi pertama disampaikan Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi, Ikhsan Nur Isfiyanto dan dilanjutkan dengan materi kedua oleh Koordinator



Divisi (Kordiv) Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya dibuka dua sesi diskusi dengan model kuis dan nampak para siswa/siswi antusias mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kegiatan yang melibatkan 276 siswa/siswi ini diakhiri dengan penandatanganan kerjasama (MoU) 'Pendidikan Pengawasan Partisipatif' dan pemberian/penyerahan buku Bawaslu kepada pihak sekolah.

Meski virus Covid-19 melanda penduduk dunia, bukan berarti produktivitas setiap orang atau lembaga ikut lumpuh. Hal itu dibuktikan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan mengikuti kelas online 'Peningkatan Kapasitas Menulis Berita dan

Opini' yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Senin (23/03/2020) beberapa waktu lalu.

Acara dimulai Pukul 10.00 WIB dan dipandu langsung sekaligus sebagai narasumber Koordinator Divisi (Kordiv) Humas Hubal Bawaslu Jawa Tengah, M Rofiuddin. Kelas online yang dimaksud untuk meminimalisir tatap muka secara langsung serta ikut mendukung kebijakan pemerintah demi mencegah penularan virus tersebut.

Selain bertanggungjawab kepada masyarakat dengan cara memastikan setiap tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai regulasi yang berlaku, Bawaslu juga memiliki kewajiban soal transparansi penggunaan anggaran yang akuntabel dan berkualitas. Maka Bawaslu khususnya Provinsi Jawa Tengah terus melakukan supervisi di tingkat Kabupaten/ Kota dengan memberi penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2020. Kali ini rombongan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dipimpin Kepala Sekretariat Bawaslu

Jateng, Kartini Tjandra Lestari mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Kamis (02/07/2020).

Kegiatan tersebut dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor 0239/Bawaslu/SJ/KU.00.03/VI/2020 pertanggal 11 Juni 2020, perihal Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2020. Adapun penilaian PIPK Semester I ini focus memeriksa dokumen pendukung yang menjadi bahan penilaian. Antara lain kas di Bendahara, akun Peralatan dan Mesin, serta kas lainnya di K/L dari Hibah. (Dars)



TUTUP TAHUN 2020; BAWASLU KARANGANYAR BERSAMA RAKYAT

Menjelang detik-detik pergantian tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menggelar kegiatan sosialisasi partisipatif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat di empat Desa, yaitu Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Desa Bangsri, Kecamatan Karangpandan, Desa Tawang Sari, Kecamatan Kerjo, dan Desa Pereng, Kecamatan Mojogedang. Kegiatan

yang dikemas dengan dialog ini tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 diantaranya saat pelaksanaan di sediakan masker, alat cek suhu badan, dan hand sanitizer. Acara ditutup dengan penandatanganan MoU antara Bawaslu dengan Desa yang masing-masing diwakili Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan Kepala Desa. Kesepakatan tersebut memuat

bahwa Bawaslu dan desa bersepakat akan bersama-sama melakukan pengawasan Pemilu/Pilkada yang akan datang. (Dars)



RAMAIKAN HUT BAWASLU RI KE-12, BAWASLU KARANGANYAR GELAR BAKTI SOSIAL DAN PENYEMPROTAN DISINFEKTAN



Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Bidikan bansos dalam perayaan Hut kali ini menysasar masyarakat yang paling terdampak adanya Covid-19, antara lain tukang becak, tukang parkir, tukang tambal ban, dan sebagainya.

Selain pembagian sembako, kegiatan lain adalah penyemprotan disinfektan di lingkungan Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan sekitar. Terlaksananya penyemprotan kali ini atas kerjasama Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan Lazis Muhammadiyah.

Farida, salah satu warga yang bertempat tinggal tidak jauh dari Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyambut baik kegiatan Bawaslu. Menurutnya, memastikan kesehatan masyarakat juga sama pentingnya menjaga hak pilih di seluruh negeri. (Dars)

Tahun 2020 Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu genap berumur 12 Tahun. Masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kotase-Indonesia melaksanakan serangkaian kegiatan yang berbeda-beda. Adapun untuk Bawaslu Kabupaten Karanganyar sendiri menyepakati

pelaksanaan Bakti Sosial (Bansos) disekitaran Kantor Bawaslu. Sebelum membagikan paket bansos berupa sembako, terlebih dahulu digelar doa bersama dan pemotongan tumpeng di Ruang Pojok Pengawasan, Kamis (09/04/2020).

Kegiatan tersebut diikuti segenap jajaran sekretariat bersama Komisioner



POLITIK UANG PILKADA PADA MASA PANDEMI

Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H.
(Kordiv Penindakan Pelanggaran)

Pandemi Covid-19 menyebabkan lahirnya beberapa kebijakan salah satunya adalah lahirnya Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang rencana akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 secara garis besar mengatur lebih rinci tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Berkaca dalam penyelenggaraan pilkada sebelumnya, praktik politik uang sudah bukan rahasia lagi. Penyelenggara pemilu dalam hal ini Badan pengawas pemilu (Bawaslu) sudah melakukan penegakan aturan dan penindakan bagi pelanggaran. Berdasarkan temuan fakta di lapangan, praktik politik uang terjadi karena ada persaingan merebut suara pemilih atau mencari dukungan yang sebanyak-banyaknya dari

pemilih.

Melihat situasi kekinian di masa pandemi Covid-19, di mana keadaan sulit, banyak orang kehilangan pekerjaan, dan ekonomi sedang terpuruk, potensi politik uang di pilkada bisa tumbuh subur jika tidak diantisipasi sejak dini. Diakui atau tidak, tingkat kesadaran politik sebagian masyarakat masih rendah. Masyarakat cenderung menantikan kandidat kepala daerah turun ke lapangan karena biasanya membawa bingkisan berupa sembako atau bantuan sejenis.

Realita lain muncul terkait relevansi politik anggaran dalam demokrasi pada pelaksanaan pemilu atau pilkada. Calon kepala daerah petahana yang berangkat dari koalisi partai politik memiliki potensi untuk melakukan politisasi anggaran, misalnya dengan memanfaatkan program bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 yang ditumpangi sebagai ajang kampanye terselubung.

MUNGKINKAH TANPA POLITIK UANG ?

Salah satu pemilu yang diselenggarakan di Indonesia adalah Pilkada. Pilkada Serentak 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan 2015 sesuai amanat UU Pilkada Nomor

10 Tahun 2016, Pasal 201 ayat (6). Magnet kekuatan para kompetitor petahana dalam pilkada memiliki bias terhadap kualitas demokrasi. Politik anggaran sebagai kekuatan petahana selalu menjadi catatan kaki dari setiap pelaksanaan Pilkada, apalagi ketika sudah dibumbui



oleh menu money politics, baik berdimensi mahar politik, mobilisasi suara serta kolaborasi penyelenggara pemilu dengan peserta pemilihan masih melekat membajak demokrasi secara substansial.

Bagi sebagian masyarakat yang mempunyai hak pilih, moment pilkada ini dimanfaatkan untuk meraih keuntungan dengan jalan menjual suaranya kepada calon tertentu. Tentu ini



merusak tatanan demokrasi. Suaramerekadiberikankepada calon yang memberikan uang atau barang. Inilah yang lazim disebut dengan politik uang.

Bila dicermati, keadaan “inspiratif” yang dilakukan oleh pelaku politik uang dalam Pilkada masuk ke dalam ranah pidana. Orang yang terlibat politik uang terancam pidana minimal 36 bulan penjara. Aturan tersebut termaktub dalam Pasal 187 A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Politik uang umumnya



dilakukan oleh simpatisan, kader ataupun tim sukses paslon menjelang hari H pemilihan. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian uang, sembako berupa beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati rakyat agar mereka memberikan suaranya untuk paslon yang bersangkutan. Politik berbiaya tinggi karena praktik kotor akan menghasilkan pemimpin

yang korup dan tidak peduli terhadap kepentingan jangka panjang masyarakatnya.

Lumpuhnya aktivitas perekonomian terutama di daerah-daerah zona merah Covid-19 melahirkan kantong-kantong kemiskinan baru. Problem utama yang dihadapi masyarakat tentu saja adalah menurunnya daya beli yang berimbas pada ketidakmampuan dalam menyediakan pasokan logistik (pangan) untuk rumah tangga mereka. Respons pemerintah atas problem krusial ini secara eksplisit ditunjukkan dengan program jaring pengaman sosial, salah satunya adalah bansos pangan (sembako) yang dianggap dapat mengurangi langsung beban pengeluaran masyarakat miskin.

Terkait pengaturan tentang pelanggaran money politik, perlu juga dipahami antara rezim pemilu dan pilkada memiliki konsep-konsep, norma, dan pengaturan yang berbeda sehingga dalam penerapannya juga berbeda. Meski demikian, terdapat hal-hal yang dalam rezim pilkada mengatur lebih tegas. Itu bisa dilihat dari unsur pelaku politik uang yang dalam Pasal 187A UU Pilkada menyebut setiap orang. Sedangkan dalam UU 7/2017, politik uang dibagi ke dalam sub tahapan, yaitu di masa kampanye unsurnya pelaksana kampanye, di masa tenang adalah tim dan pelaksana kampanye, dan di hari pemungutan suara adalah setiap orang.

Lalu apakah mungkin pelaksanaan Pilkada tanpa politik uang? jawabannya tentu saja bisa asalkan kita semua

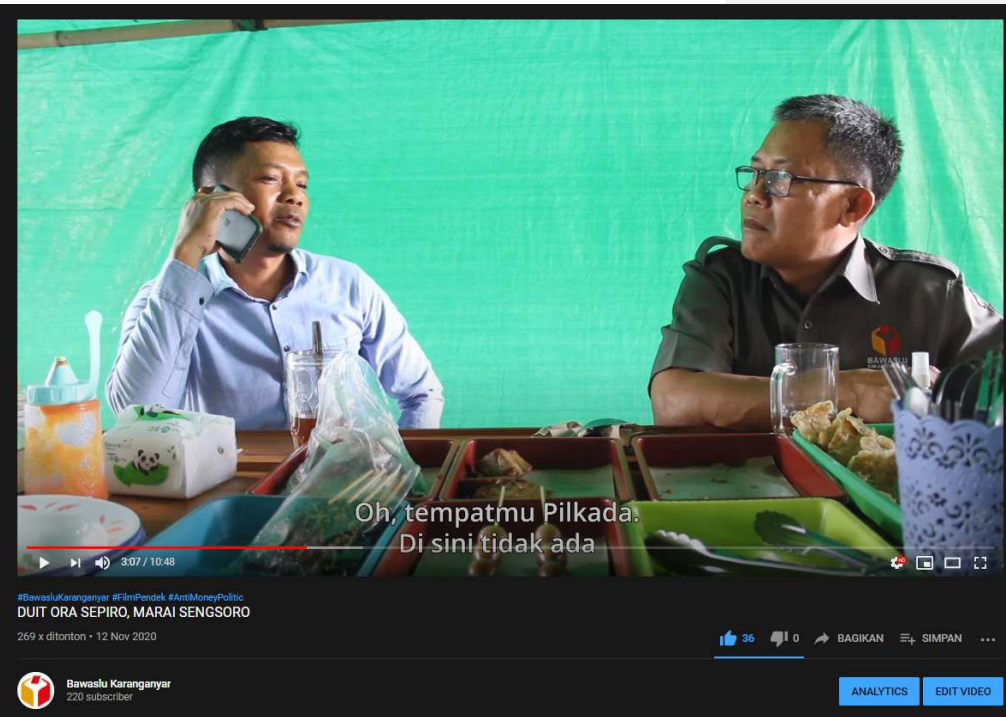
serius bekerja sama untuk mencegahnya. Masyarakat sangat memegang peranan penting dalam menentukan tipe pemimpin/kepala daerah.

Karena apabila salah dalam memilih, maka akan menderita selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Janji-janji tinggal janji. Janji hanyalah sebagai pemanis bibir yang penuh tipu muslihat untuk menarik simpati masyarakat agar memilih dirinya.

Oleh karena itu hendaknya masyarakat tidak tergiur dengan pemberian uang atau barang sebab hal tersebut justru akan merugikan masyarakat itu sendiri. Selain itu, masyarakat juga perlu memahami latar belakang, rekam jejak dari setiap kontestan. Dengan demikian pilkada dapat menghasilkan seorang pemimpin amanah serta bermoral tinggi.

Akhirnya penegakan hukum tindak pidana politik uang bukanlah hal yang mudah tetapi juga sebaliknya bukan hal yang sulit untuk diwujudkan, kesadaran akan masalah dan kemauan untuk menemukan solusinya demi perbaikan demokrasi yang berkualitas adalah obat mujarab dari penyakit demokrasi yang menjangkiti pemilu kita dewasa ini.





Edukasi demokrasi merupakan topik yang menarik untuk dibicarakan. Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengemas edukasi demokrasi dalam suatu short movie bertajuk Film Pendek. Total sudah ada 2 film pendek yang telah rilis. Edisi pertama yaitu Salah Ngalamat dengan tokoh utama yaitu Joko HP sebagai Satpam Bawaslu Karanganyar, dan Rohmat sebagai Pegawai Koperasi. Menceritakan tentang seorang pegawai koperasi yang berniat pergi ke Disperindakop malah salah alamat ke Bawaslu

Kabupaten Karanganyar. Setibanya disana ia bertemu Pak Joko. Setelah dijelaskan bahwa salah alamat, mereka mengobrol bahwa kantor yang dituju oleh Pak Rohmad adalah Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar bukan lagi Kantor Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Karanganyar.

Film pendek tersebut juga menjelaskan mengenai tugas dari Bawaslu itu sendiri. Bertepatan dengan adanya momen Pilkada serentak pada tahun 2020, film kedua ini mengambil tema mengenai Money Politik dibintangi oleh

Rohmad sebagai Petugas Koperasi, Joko sebagai Satpam Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan Nuning Ritwanita Prihastuti sebagai Ketua dan Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Alur cerita film ini menceritakan mengenai stigma masyarakat yang menganggap bahwa penerima politik uang itu tidak bersalah karena mereka tidak meminta, serta dianggap halal sebab diberikan secara cuma-cuma. Pemikiran tersebut nyatanya salah, Nuning selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar memberikan pencerahan kepada mereka mengenai apa itu money politik, diterangkan juga tentang pilkada dan kasus yang telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan Pilkada 2018 kepada Pak Rohmad.

Diharapkan dengan menggunakan media sosial sebagai prasarana untuk sosialisasi bisa menjangkau kepada semua kalangan baik di wilayah Karanganyar maupun diseluruh wilayah Indonesia terkait masalah demokrasi sehingga apa yang dicita-citakan oleh undang-undang bisa tercapai.(AA)

SKPP BUKAN SEKEDAR SINGKATAN

Argo Teguh Herjantoro, S.P. (Staf Pengawasan Bawaslu Kab. Karanganyar)

Lahirnya kader pengawas partisipatif tidak terjadi secara spontan dan instan, perlu jalani proses yang panjang, sehingga kader yang terbentuk betul – betul paham

dan profesional. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi proses setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, dan tentunya tidak

lepas dari partisipatif semua elemen masyarakat / ormas. Membangun, membentuk serta melibatkan segenap kelompok masyarakat untuk andil dalam partisipasi pengawasan di setiap



tahapannya.

SKPP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) sebagai media transfer keilmuan secara daring dengan masyarakat, dan gerakan bersama Bawaslu dengan masyarakat untuk mendorong dan membentuk kader pengawas bersama – sama menciptakan proses penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan bermartabat. Keterlibatan masyarakat diwujudkan dengan melakukan pengawasan atas kecurangan yang terjadi pada setiap tahapan proses penyelenggaraan pemilu. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat yang dilakukan secara daring. Dengan menggunakan teknologi informasi dan media sosial, SKPP Daring menjadi jalan keluar dari keterbatasan ruang dan waktu dalam penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Diharapkan akan semakin banyak pihak yang mengetahui tugas, pokok dan fungsi pengawasan penyelenggaraan



Pemilu, sehingga jumlah masyarakat pemilih yang terlibat dalam proses Pemilu semakin meningkat. Dengan SKPP diharapkan ada fasilitas yang baik dan optimal yang menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melakukan pengawasan partisipatif. SKPP diharapkan meningkatkan ruang-ruang diskusi yang intensif dan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pengawasan partisipatif. Dari SKPP diharapkan lahir aktor-aktor pelaku pengawas partisipatif serta kader yang menggerakkan masyarakat untuk turut mengawasi penyelenggaraan Pemilu di semua lapisan masyarakat.

Dalam jangka pendek, peserta atau anak didik SKPP diharapkan mampu menjadi pengawas partisipatif dan menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu secara partisipatif di daerahnya masing-masing. Secara jangka panjang diharapkan program ini dapat berkesinambungan dan menjadi model pengawasan pemilu partisipatif yang dapat dilaksanakan pada pemilu-pemilu selanjutnya. Dengan demikian, seluruh lapisan

masyarakat terlibat dalam pengawasan pemilu pada seluruh tahapannya

Transfer keilmuan seputar pengawasan kepemiluan difasilitasi oleh tenaga pengajar SKPP Daring yang terdiri dari ahli dan praktisi kepemiluan dari unsur jajaran Bawaslu di setiap tingkatan. Proses pembelajaran pada SKPP Daring dilakukan dengan metode pembelajaran audio visual, diskusi daring, whatsapp group dan ujian daring sebagai alat verifikasi.

Materi yang disampaikan dalam audio visual sejumlah 10 topik yaitu Pemilu dan Pilkada; Regulasi Pemilu dan Pilkada; Kerawanan Pemilu; Pengawasan Pemilu dan Pilkada; Mekanisme Penanganan Pelanggaran; Mekanisme Penyelesaian Sengketa; Pengawasan Partisipatif; Strategi Kehumasan Kader Pengawas Pemantau Pemilu; Evaluasi, pada setiap materi mempunyai maksud dan tujuan tersendiri, sehingga peserta SKPP benar – benar memahami dan siap dibentuk menjadi kader pengawas yang professional. Setelah lulus dalam ujian daring, peserta SKPP mendapatkan sertifikat dari Bawaslu RI.(5G)



SINERGI LEMBAGA BAWASLU

Sri Handoko Budi Nugroho, S.T., M.M.

(Kordiv Pengawasan Hubungan Antar Lembaga)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan pemilu di negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang struktur, kewenangan, fungsi dan tugas Bawaslu. Berdasarkan UU tersebut, Bawaslu kabupaten/kota sudah tidak lagi berbentuk adhoc (sementara) tapi sudah permanen dengan periodisasi kerja lima tahunan dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang terdiri dari seorang koordinator sekretariat dan beberapa staf pelaksana.

Salah satu misi Bawaslu adalah membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid. Salah satu indikator dari lembaga handal adalah sinergi organisasi.

Meningkatkan sinergi antar divisi/unit kerja bukanlah hal yang mudah. Kendala dalam komunikasi, prasangka, tumpang tindih tupoksi hingga gesekan dalam organisasi adalah hambatan yang berpotensi mengganggu kinerja organisasi. Jika energi dalam organisasi habis untuk menyelesaikan kendala-kendala internal, maka akan semakin berkurang energi untuk membangun dan mencapai tujuan organisasi.

Oleh karenanya perlu dibangun dan diperkuat sinergi dalam organisasi, membentuk mindset one team one spirit, dan hal tersebut dimulai dengan membangun kesadaran yang dimulai dari level para pimpinan unit organisasi. Hal pertama yang dilakukan adalah membangun kesadaran pimpinan organisasi untuk saling melengkapi, bukan saling bersaing, apalagi menjatuhkan.

Menyatukan pimpinan di level atas bukan hal yang sederhana, akan tetapi juga bukan hal yang tidak mungkin. Sebuah tim yang baik adalah hasil dari pembentukan, dan sinergisme kerja antar pimpinannya. Orang-orang yang terpilih di dalam tim bisa saja bukan orang-orang yang hebat, namun sebuah tim yang baik sekalipun bisa berevolusi menjadi tim yang buruk yang menjadi disfungsional ketika sinergi antara anggota tim dan komitmen terhadap

organisasi memudar.

Sinergi berasal dari bahasa Yunani synergos yang berarti bekerja bersama-sama.



Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas.

Sinergi dapat terjadi melalui suatu dinamika orang per orang yang berinteraksi dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu sinergi terwujud dari perpaduan dari perilaku para anggota tim yang berinteraksi. Hasil itu diperoleh dari suatu pertemuan dialogis, saling keterbukaan, kemauan menerima pendapat orang,



tidak merasa terancam secara intelektual maupun personal atas gagasan orang lain.

Sinergi efektif, pada hakekatnya merupakan hasil dari suatu proses perpaduan dari cara-cara bagaimana mengatasi masalah dan perpaduan gagasan yang



dijalankan oleh team work dengan saling percaya dan bersikap saling mendukung. Hasil kerja yang sinergistik akan menghasilkan suatu gagasan baru yang benar-benar memberikan kepuasan secara intrinsik bagi kedua belah pihak. Kerjasama hanya akan dapat tercipta bila setiap anggota kelompok merasakan adanya kebersamaan tujuan dan kekompakan.

Bekerjasama merupakan tindakan sukarela untuk saling berkontribusi demi manfaat organisasi. Bukan social loafing, bekerja dalam tim, tapi dengan hasil yang lebih rendah dari seharusnya (dibanding dengan kumulatif hasil yang diharapkan dari setiap anggota tim). Bukan

juga free riding, karyawan ikut bekerjasama, tapi cenderung hanya mengambil untungnya atau hanya mau enakannya (seperti hanya titip nama pada tugas kelompok).

Untuk memperoleh sinergi, suatu kelompok perlu untuk menyegarkan diri dengan gagasan-gagasan, perlu otokritik dari dalam kelompok itu sendiri maupun dari luar. Bila yang terjadi adalah kritikan dari luar kelompok, maka perlu adanya wawasan kebersamaan tujuan, sehingga kritikan itu lebih bersifat konstruktif. Sebaliknya bagi yang menerima kritikan mampu mendengarkan dan percaya bahwa hal tersebut merupakan usaha pihak lain untuk memperbaiki kinerja kelompok. Rasa saling percaya lah yang akan merekatkan kondisi itu, sehingga yang menjadi pemikiran selanjutnya adalah bagaimana rasa saling percaya itu bisa dibentuk.

Sinergi dapat tercipta bila dilandasi oleh rasa saling percaya yang tinggi.

Membangun rasa saling percaya menjadi isu yang sangat penting yang perlu untuk terus dibina. Tanpa rasa saling percaya orang akan selalu melindungi diri, meletakkan diri pada posisi bertahan, dan semuanya itu menghambat orang untuk belajar lebih maju.

Organisasi yang menghasilkan sinergi perlu kemampuan orang untuk melahirkan gagasannya yang inovatif, namun bersama dengan itu perlu kemampuannya untuk berbeda pendapat dan bertukar pendapat secara terbuka dan tulus, dan dalam prosesnya dijalankan melalui tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Harapan besar dari adanya sinergitas adalah tercipta lembaga yang solid, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik untuk mewujudkan visi dan misi lembaga.



PEREMPUAN, POLITIK & DEMOKRASI

Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H.
(Kordiv Penindakan Pelanggaran)

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Seperti yang diketahui, demokrasi seakan berteman baik dengan budaya politik. Demokrasi tidak akan berjalan apabila tidak ditunjang oleh terbangunnya budaya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Ia berjalan berirama, dan tak dapat lepas satu sama lainnya

Demokrasi di berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara terus berkembang dan berproses. Upaya penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat sipil, merebaknya perhatian terhadap hak asasi manusia, telah membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mengikis diskriminasi ras, suku, bangsa, agama, minoritas, dan terkhusus kaum perempuan (gender).

Salah satu pendukung demokrasi yang sangat potensial adalah keterlibatan kaum perempuan dalam kancah politik. Sudah saatnya penguatan hak politik dan pendidikan politik bagi perempuan diutamakan. Pendidikan politik bagi perempuan harus mempunyai arah yang jelas menuju pada kemampuan kaum perempuan yang memiliki kekuatan kesadaran akan pentingnya pembebasan kaum perempuan terhadap marginalisasi politik terhadap kaumnya, sehingga

kaum perempuan memiliki jati diri yang kuat dalam kiprah politiknya.

Mempersoal perempuan, tidak ada habis-habisnya menjadi bahan perdebatan ketika kita menyinggung entitas masyarakat yang satu ini. Partisipasi perempuan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia menjadi hal yang harus disorot. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, dan semua sektor pembangunan. Ini adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri, meskipun saat ini ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender.

Dalam demokrasi inklusif, masyarakat sebagai salah satu pilar penting demokrasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna. Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting. Sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan.

Mengenang emansipasi di Indonesia, Sedikit kita menelisik sejarah tentang eksistensi dan peranan wanita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tentu kita sudah tak asing lagi dengan nama RA Kartini yang menjadi salah satu pahlawan wanita dalam membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Kita harus bersyukur atas perjuangan sosok Kartini yang memperjuangkan emansipasi perempuan dan



melakukan perubahan tatanan sosial agar kaum perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Di Indonesia sejak reformasi, partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting pemerintah. Berbagai kebijakan afirmasi dan penguatan terus diupayakan. Partisipasi politik perempuan diharapkan tidak saja berpartisipasi dalam memilih tetapi juga berpartisipasi menjadi anggota legislatif baik di pusat maupun di daerah.

Demokrasi di Indonesia saat ini telah menuju ke arah yang lebih baik, selain dibuktikan dengan lahir dan diperkuatnya kebijakan afirmasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, secara de jure pemerintah telah memberikan dukungan penuh dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas politik, strategi afirmatif kuota 30% bagi perempuan.

Ini juga terbukti bahwa masyarakat Indonesia setuju jikalau



perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk terlibat dalam bidang politik.

Namun representasi perempuan dalam bidang politik boleh dikatakan masih jauh dari apa yang diharapkan.



Pendidikan politik merupakan salah satu aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada setiap individu maupun kelompok. Proses pendidikan politik dilakukan agar masyarakat luas dapat menjadi warga negara yang sadar dan menjunjung tinggi akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Representasi perempuan dalam bidang politik juga merupakan salah satu indikator yang penting dalam sistem demokrasi. Keberadaan anggota parlemen dari unsur perempuan tidak hanya sekadar menyeimbangkan jumlah anggota parlemen (gender balance), tetapi juga diharapkan bisa mendorong isu perempuan menjadi prioritas, sehingga lahir berbagai kebijakan yang sensitif tentang gender. Kehadiran perempuan di parlemen akan mendorong perempuan lain untuk terlibat dalam politik,

mencapai kesetaraan gender, memperjuangkan kepentingan perempuan, dan memberikan warna yang berbeda dalam politik.

Meskipun saat ini politisi perempuan sudah mulai bermunculan, namun dalam kenyataan belum begitu besar pengaruhnya dalam memperjuangkan aspirasinya. Oleh karena itu, jalan yang harus ditempuh adalah menciptakan kesadaran politik perempuan dalam meningkatkan peran politiknya adalah dengan memberikan pendidikan politik sesuai dengan makna yang sebenarnya, sehingga dalam kancah politik, perempuan mempunyai peran dalam mengembangkan demokrasi dan cerdas dalam menentukan sikap politiknya.

Dengan dilakukan pendidikan politik diharapkan dapat menjadi sarana bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai persoalan politik serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan kata lain, pendidikan politik memiliki makna yang penting dan strategis dalam rangka mendorong warga negara untuk memiliki pengetahuan politik yang memadai khususnya kaum perempuan.

Dalam meningkatkan peran dan kinerja para anggota perempuan di dalam organisasi maupun partai politik, maka pendidikan politik menjadi urgen untuk dilaksanakan dan ditingkatkan. Namun demikian, perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi jasmani dan rohaninya, karena bagaimanapun juga terdapat perbedaan faktor biologis dan psikologis antara laki-laki dan perempuan. Faktor-faktor di atas merupakan kekurangan sekaligus kelebihan para perempuan. Diharapkan pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan para anggota perempuan di Indonesia dapat

berjalan dengan lebih efektif. Melalui pendidikan politik diharapkan perempuan mampu berperan aktif dalam perpolitikan sehingga mendapatkan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip demokrasi maupun regulasinya dengan begitu lebih rasional dan beretika dalam menyikapi fenomena demokrasi dan politik, juga untuk menyadarkan kaum perempuan akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan politik.

Dalam kaitannya dengan pendidikan politik, maka partai politik perlu memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif kaum perempuan, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam hal ini partai politik memainkan peran penting sebagai pintu gerbang keterwakilan perempuan. Pada partai politik seluruh pertarungan memenangkan kursi di parlemen terjadi. Oleh karena itu, kebijakan, praktik dan politik di dalam partai sangat menentukan wajah keterwakilan perempuan di parlemen. Namun dalam kenyataannya, peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dirasakan belum optimal.

Oleh karena itu, Sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Partai Politik, maka partai politik harus lebih memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam memberikan pendidikan politik bagi perempuan. Di samping itu, partai politik perlu menyiapkan anggaran untuk menyelenggarakan pendidikan politik bagi kaum perempuan agar amanat Undang-Undang Partai Politik dapat terwujud.

DEMOKRASI & KEBABLA SAN

Irfan Samudra (Alumni SKPP Daring)



Berbicara seputar demokrasi di era saat ini memang tidak begitu menarik, mungkin karena banyaknya hal yang menjadikannya sudah biasa atau bukan lagi hal yang harus di ulas secara berulang dan tak lagi istimewa. Namun era demokrasi saat ini yang semula kita anggap biasa ternyata mungkin malah asik saat kita lihat perkembangannya. Demokrasi atau kebablasan berdemokrasi saat ini yang akan menjadi bagian dari sisi lain saat kita melihat dan menyimak demokrasi di era milenial saat ini.

Demokrasi yang memiliki arti kebebasan yang dipimpin, nyatanya saat ini malah banyak orang yang merasa tidak terwakili aspirasinya atau kata lain mereka tidak yakin dan percaya terhadap apa yang dia wakikan di atas sana, fenomena yang akhirnya hadir adalah banyak dan ramainya gunjingan politik di era saat ini yang menjadikan orang malah jengah melihat, menyimak, mengikuti perkembangan demokrasi itu sendiri.

Kebebasan berpendapat di era demokrasi dijamin

oleh Undang-Undang, akan tetapi kebablasan juga terlihat di tingkat elit atau orang berkepentingan dalam mengolah, menggerakkan dan meracuni masyarakat dengan dalih demokrasi untuk kepentingannya

Ambil contoh paling simpel, media sosial menjadi ranah publik dalam menyampaikan aspirasi dalam berdemokrasi tetapi tidak sedikit yang terjatuh kasus hukum karena kebebasan dalam berdemokrasinya yang berlebihan dan merugikan orang lain, belum lagi aksi demonstrasi yang diijinkan juga oleh Undang-Undang, namun tidak sedikit pula yang berakhir dalam kondisi memprihatinkan seperti jatuhnya korban, terjadinya tindak anarkis, dan lain-lain. Demokrasi yang dijamin kebebasannya terkadang berakhir dengan berlebihan dan malah merugikan beberapa orang atau masyarakat serta dirinya sendiri.

Demokrasi adalah pilihan kita sebagai bangsa dan bernegara saat kita harus keluar dari masa ke masa sejak kemerdekaan bangsa Indonesia, maka lebih utama

bagi kita adalah menempatkan diri pada posisi yang tepat dan manfaat serta menyelaraskan kepentingan untuk keamanan, kenyamanan dalam berbangsa dan bernegara.

Jangan kebablasan dalam meluapkan emosi dan keinginan hasrat kepentingan pribadi golongan dan mengatasnamakan kebebasan demokrasi sehingga menjadikan masyarakat dan lingkungan menjadi terganggu dan dirugikan. Kita sebagai anak bangsa memiliki mimpi yang sama, melihat bangsa ini besar menjadikan warisan untuk anak cucu kita dan menjadi negara makmur. Berharap dimasa akan datang bisa melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita bangga melihat Indonesia. Mari bersama menjaga demokrasi dan merawatnya dengan tidak menodainya dengan hal-hal yang tidak selayaknya dan melanggar aturan-aturan yang ada demi kepentingan kita atau golongan.

BAWASLU SIAP SEDIA MENGAWASI

Cintia Oktavianingrum (Alumni SKPP Daring)

Masa pandemi adalah masa yang sangat membosankan terkhusus bagi saya yang seorang mahasiswa. Biasanya datang ke kampus,

banyak kegiatan, banyak bertemu kawan juga lawan hehe. Akan tetapi dengan adanya pandemi COVID-19, semua kegiatan dibekukan, aliasnya semua masyarakat

diharuskan karantina mandiri dirumah, tentu juga bidang pendidikan menutup fasilitas sekolah maupun kampus. Mahasiswa dituntut untuk melakukan kuliah secara



daring, tentu saja banyak melakukan kegiatannya hanya dirumah, tidak ada kegiatan diluar rumah tentu saja membuat otak menjadi penat. Kuliah daring dan mengerjakan tugas sudah menjadi rutinitas sehari-hari, rasanya tugas di masa pandemi ini tidak ada habisnya, tetapi anehnya dengan tugas kuliah sebanyak itu saya masih merasa punya banyak waktu luang.

Terpikirlah saya untuk menambah wawasan, entah membeli buku atau melihat video dokumenter para pendahulu, scroll sosial media sudah menjadi teman sehari-hari bagi saya. Kebetulan waktu saya lihat-lihat instagram ada sebuah feed informasi mengenai kesempatan untuk mengetahui apa saja tentang Pengawasan pemilu. Tertariklah saya



tentang kepemiluan, tanpa berfikir panjang saya langsung mengirim dokumen mendaftar menjadi peserta melalui e-mail. Nama kegiatannya adalah Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP) Daring Bawaslu, kalau tidak salah satu bulan setelah saya mendaftar ada informasi melalui whatsapp, intinya untuk mengisi formulir kesediaan mengikuti kegiatan

tersebut.

Setelah proses tersebut, kita sebagai peserta diberi informasi mengenai tahapan apa saja yang harus peserta lalui agar bisa lulus yakni video learning, webdiskusi dan ujian online. Tahapan tersebut saya lalui satu persatu dengan semaksimal mungkin, karena kegiatan ini menggunakan sistem gugur. Jadi kalau semisal salah satu tahapan tidak lulus maka tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Alhamdulillah nya dengan serius saya agar lebih memahami tentang pengawasan partisipatif, saya lulus dan mendapatkan predikat memuaskan. Beruntungnya lagi video daring yang diberikan bawaslu sangat banyak ilmunya, membuat saya semakin memahami tentang hal-hal pengawasan partisipatif, yang notabene di Indonesia maraknya politik uang masih sangat digandrungi masyarakat awam. Tidak cukup sampai di SKPP Daring Bawaslu Kabupaten Karanganyar, saya juga mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi di kabupaten untuk ikut serta sebagai delegasi yang dikirim ke SKPP Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Beruntungnya dari 4 orang yang mengikuti seleksi, saya salah satu yang berkesempatan untuk mengikuti sekolah ini dengan Sistem Luring yang bertempat di Hotel Alana Salatiga selama 3 hari berturut-turut. Saya sudah membayangkan akan bertemu dengan mentor yang luar biasa juga dengan rekan aktivis yang sangat luar biasa

pola pikirnya. Selama kegiatan tersebut, saya mendapat banyak ilmu sekaligus pengalaman dari para mentor di bidang pengawasan pemilu. Selain itu saya juga bisa mendapatkan relasi dari berbagai kabupaten, saya juga berkesempatan berbagi dengan mereka sampai pagi, bisa dikatakan nongkrong tetapi pembahasannya lengkap tentang politik. Obrolan semakin membara ketika kita sama-sama tahu bahwa keresahan di daerah kita mengenai pemilu itu sama, yaitu masih maraknya politik uang.

Selain itu kita juga merasa sefrekuensi, karena kita masih sama-sama mahasiswa dengan jurusan berbeda tetapi memiliki visi yang sama. Hasil diskusi kita berlanjut menjadi Rencana tindak lanjut alumni SKPP Bawaslu Jateng gelombang I. Benar, walaupun hal itu masih jauh dari angan-angan untuk tidak benar-benar hilang dari budaya politik kita, tetapi kami yakin bahwa kita sebagai generasi penerus akan terus meminimalisirkan terjadinya money politic. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan relasi yang sefrekuensi untuk perubahan yang lebih baik. Saya merasa sama sekali tidak ada rasa menyesal atau apapun karena mengikuti SKPP Bawaslu ini. Banyak ilmu yang mulai saya pahami, banyak relasi yang saya kenal, semakin bertambahnya pula semangat saya untuk selalu menjadi pengawasan partisipatif dengan tujuan pemilu di indonesia benar-benar LuBerJurDil.





DEMOKRASI PERSPEKTIF KEARIFA

bawaslu karanganyar | bawaslu karanganyar | bawaslu karanganyar
KARANGANYAR | 3 MARET 2020



GALERI TAHUN 2020

#menujudemokrasiyangberadab





Sajak Demokrasi

PART III



*Toleransi adalah keindahan tertinggi dari Demokrasi.
Membangun kemajemukan dan ruang argumentasi
dalam mempresentasikan arti utuh dari Demokrasi.
Politik adalah jalan mencapai kedaulatan rakyat
dalam sebuah konstitusi.*

*Bukan ruang atau sistem membangun oligarki.
Demokrasi perlu melihat aspek sosial, kebudayaan,
kemanusiaan bahkan hibridisasi dari segala sisi.*

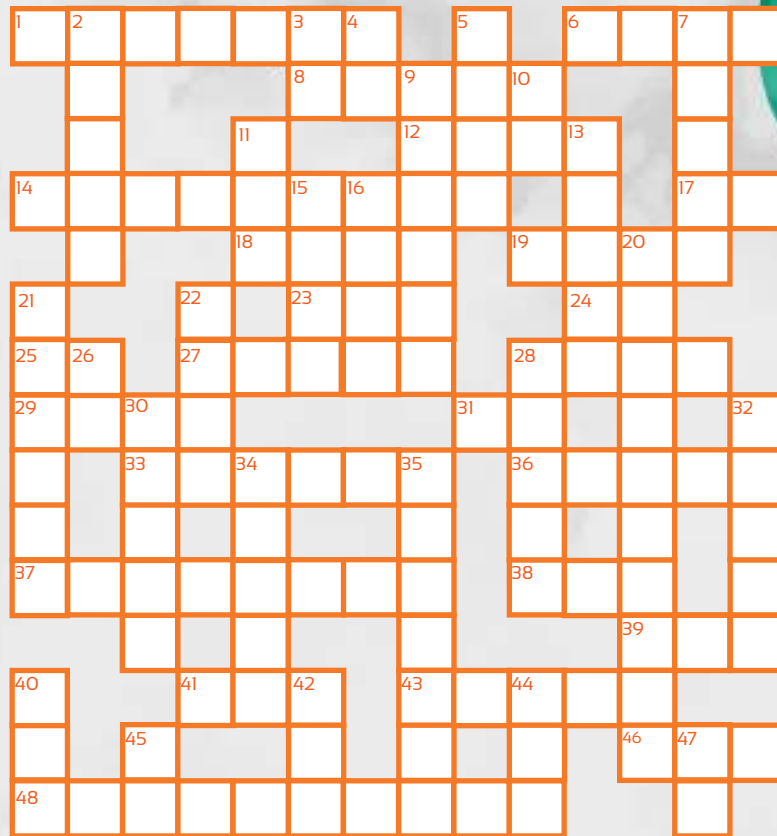
*Bukan sentimen politik yang terus dipertontonkan dalam
panggung dengan dalih menjaga Demokrasi.
Publik adalah komponen terpenting dalam memperkaya
diseminasi.*

*Ide, gagasan, kritik adalah alam kontrol alami dalam
menterjemahkan hakikat Demokrasi.
(aris_arrifqi)*

Jawaban edisi 2

- | | | | |
|--------------|----------------|-------------|-----------------|
| 1. Gakkumdu | 6. Kasta | 11. Tuas | 16. RAB |
| 2. Afiliasi | 7. Panwaslu | 12. Siwaslu | 17. Klarifikasi |
| 3. Introvert | 8. Tawangmangu | 13. APINDO | 18. Soda |
| 4. Etalase | 9. Ligitasi | 14. Anoa | 19. Laporan |
| 5. Rampai | 10. Keraguan | 15. Sanga | |





Mendatar

1. Penyakit Yang Menyebar Secara Global Meliputi Area Geografis Yang Luas
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Yang Disusun Oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
8. Pejabat Yang Memimpin Persidangan
12. Institut Agama Islam Negeri
14. Yang Melakukan Pencegahan Dan Penindakan Di Wilayah Kecamatan Terhadap Pelanggaran Pemilu
18. Surat Keterangan Keimigrasian
19. Rasa Makanan
23. Pielonefritis Akut
24. Masuk (Inggris)
25. Pengadilan Untuk Masalah Agama Di Tingkat Kota/ Kabupaten
27. Empat (Jawa)
28. Orang Yang Bekerja Pada Raja Atau Pemerintah
29. Makanan Pelengkap Yang Difermentasikan
31. Tiruan
33. Sesuatu Yang Didambakan
36. Lembaga Pendidikan Untuk Mencetak Perwira Polri
37. Makanan Yang Dibuat Dari Parutan Kelapa dan Digoreng
38. Kode Singkatan Indonesia Untuk Urusan Kenegaraan
39. Dewan Perwakilan Wilayah
41. Almarhum
43. Rangkai
46. Salah Satu Sungai Terpanjang Di Dunia
48. Sekelompok Orang Dalam Suatu Wadah Untuk Tujuan Bersama

Menurun

2. Ketua Bawaslu RI periode 2017-2022
3. Magister Hukum
4. Divisi Di Amerika Serikat Yang Mengawasi Penyalahgunaan Hukum Dari Pegawai Pemerintahan Di Sana
5. Sistem Informasi Akademik Mahasiswa
7. Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Honorer, Staf Khusus, Dan Pegawai Lain Yang Dibayarkan Oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
9. Hari Akhir
10. Satuan Pendidikan Formal Yang Setara SD
11. Alat Pembayaran Yang Siap Dan Bebas Digunakan Untuk Membiayai Kegiatan Umum Perusahaan
13. Sesuatu Yang Sudah Ditentukan Oleh Tuhan Atas Diri Seseorang
15. Program Sekolah Daring Yang Dimiliki Oleh Bawaslu
16. Negara Pertama Virus Corona Terdeteksi
17. Komputer Pribadi
20. Tidak Terikat Pihak Lain
21. Acuh Tak Acuh, Tidak Peduli
22. Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Yang Berkedudukan Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Di Provinsi Kabupaten/Kota
26. Pendingin Ruangan
28. Cegah, , Tindak
30. Mata (Arab)
32. Mengizinkan (Inggris)
34. Turut Serta
35. Negara Di Afrika Barat 2
40. Setuju
42. Gelar Akademik S2 Di Bidang Sains
44. Sebutan Untuk Perempuan Yang Sudah Menikah
45. Aplikasi Jejaring Social Untuk Berbagi Foto Dan Video
47. Manajemen Sistem Informasi Berbasis Computer



2021

Januari

SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MIN
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Februari

SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MIN
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

Maret

SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MIN
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

April

SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MIN
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Mei

SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MIN
					01	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Juni

SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MIN
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Juli

SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MIN
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Agustus

SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MIN
						01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

September

SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MIN
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Oktober

SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MIN
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

November

SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MIN
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Desember

SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MIN
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

